

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASA OTONOMI DAERAH
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA****ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE DURING LOCAL GOVERNMENT DISTRICT
AUTONOMY NABIRE PAPUA**

Oleh:
Welio Wonda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:

weliowonda22@yahoo.com

Abstrak : Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksana kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui kemajuan organisasiserta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan termasuk akuntabilitasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire pada masa otonomi daerah, dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, metode yang digunakan kuantitatif, untuk mengukur keuangan melalui rasio, hasil penelitian menunjukkan rasio efektifitas baik. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Nabire sebagaimana lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: *Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan*

Abstract : Performance measurement is a method or device used to record and assess the achievement of implementing the activities based on the goals, objectives and performance measurement can diketahui strategi. Melalui organisasiserta progress improving quality in decision keputusan including accountability. The purpose of this study to determine the financial performance of local governments in the Nabire Regency period of regional autonomy, carried out at the Department of Revenue and Asset, which used quantitative methods, for financial measure by the ratio, the results menunjukkan rasio good effectiveness. Suggestions for Nabire regency government as more boost regional revenue through taxes and levies sector.

Keywords: *Financial Ratios, Financial Performance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kinerja adalah segala gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategis plening. kinerja bisa diketahui hanya individu maupun kelompok, individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis yang dimulai dari visi dan misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio Efisiensi, rasio Efektifitas, dan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Nabire dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor.12 tahun 1969 tentang pembentukan Kabupaten Nabire. Bahwa maksud dari pembentukan Kabupaten Nabire diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan Kemampuan dalam Pemamfaatan potensi daerah luas wilayah Kabupaten Nabire yang sebesar 144, 12 terdiri dari 15 kecamatan, yaitu, kecamatan Uwapa, kecamatan Manou, kecamatan Dipa, kecamatan Yaur, kecamatan Teluk Umar, kecamatan Wanggar, kecamatan Nabire Barat, kecamatan Nabire, kecamatan teluk kimi, kecamatan Napan, kecamatan Makimi, kecamatan Wapoga, kecamatan Moora, kecamatan Siriwo, kecamatan Yaro. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis kinerja pemerintah keuangan daerah Kabupaten Nabire dengan menggunakan rasio keuangan.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Nabire dalam masa Otonomi Daerah, khususnya pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Werren (2008:10) mendefinisikan bahwa Akuntansi ialah seni mencatat, mekelompokkan, mengikhisarkan menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-sedikitnya bersifat dinantikan dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam aktivitas mengenai ekonomi dan kondisi perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempegaruhi. Mardiasmo (2011:10) mendefinisikan bahwa organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponem lingkungan yang mempegaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor, ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-undang Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah yaitu;
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah

- 3) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana perimbangan terdiri dari;
 - 1) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
 - 2) Dana alokasi umum
 - 3) Dana alokasi khusus
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Otonomi Daerah

Widarta (2010:2) menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah hal ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Witmore (2010: 11) menyatakan bahwa Kinerja adalah bisa diketahui hanya jika individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target kinerja, seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Elemen pokok dalam kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategis organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahsun (2013;29) menjelaskan bahwa Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran dalam Organisasi. Evaluasi kinerja (Feedbacnes), Penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akutabilitas). Upayah kongkrik dalam memformulasikan tujuan strategi organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Indikator dan ukuran kinerja financial dan non financial untuk target-target operasional tertentu memberikan garis pendoman (Guidelines) bagi manajemen menengah bawah. Hasil aktual yang dicapai untuk setiap indikator dan ukuran yang terpilih. Riview hasil aktual dengan ukuran kinerja yang ditetapkan memberikan masukan untuk diambilnya tindakan korektif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya. Pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akutabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sarana dan tujuan misi instansi Pemerintah.

Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahmudi (2013:31) menjelaskan bahwa oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik maka organisasi, sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya tingkat efisien dan tidak hanya juga ukuran financial. Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kelompok masukan input; (2) kelompok proses (process); kelompok keluar (output) kelompok Hasil (autcome) kelompok mamfaat kelompok dampak (impack).

Peran Indikator Kinerja

Mahsun (2013;12) mendefinisikan bahwa mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah jalan oleh stakeholders. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan suatu sasaran yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan

demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijakan maupun program suatu instansi pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia yang dikatakan berhasil atau tidak berhasil dimasa mendatang.

Rasio Keuangan Sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ihyady Ulum (2013: 11) menjelaskan Analisis rasio terdiri dari:

1. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan yang ditetapkan}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk PAD}}{\text{Realisasi penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } xn - xn - n}{\text{Realisasi penerimaan PAD } xn - 1}$$

Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2007), yang berjudul “Faktor-Faktor yang menghambat Pembangunan Pemerintah Daerah dalam masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire ” Hasil Penelitian yang dilakukan sekarang adalah “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif yaitu suatu pembahasan yang sifatnya menguraikan menganalisis Data atau Keadaan yang sedemikian rupa sehingga ditarik kesimpulan untuk mempertanggungjawabkan kinerja Keuangan Pemerintah yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa laporan pertanggungjawaban atas berisi target anggaran yang dibandingkan dengan realisasi anggaran, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dengan adanya anggaran pemerintah daerah yang menetapkan tolak ukur setiap Pendapatan Asli Daerah dalam pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah pertanggungjawabkan sekaligus sebagai dasar penilaian kinerja Keuangan daerah. dalam fungsi anggaran telah menjadi alat yang baik bagi pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian statistik deskriptif, dimana penelitian pengumpulan, pengelola dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran, mengenai sifat (karakteristik) objek dari data tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua pada Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah dibidang akuntansi yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah;

1. Observasi
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini
3. Mengumpulkan teori Pendukung
4. Menarik kesimpulan dan saran atas hasil analisis tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang dibagi menjadi dua yaitu;

1. Data kualitatif adalah data yang diambil berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh penelitian, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat dilengkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bedanya yang diukur dari skala numberik.
2. Data kuantitatif adalah data yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penanpilan dari hasilnya dengan table grafik, gambar atau penanpilan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa laporan realisasi tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013.

Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu;

1. Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku oleh subjek yang dapat percaya atau biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, grafik, tabel, catatan, notulen rapat atau telah dikumpulkan oleh lembaga yang pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat menggunakan data orisinal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa gambaran umum kabupaten Nabire tahun anggaran 2011-2013.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari teori-teori dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Studi lapangan, melakukan penelitian pemerintah kabupaten Nabire dinas pendapatan dan aset daerah yang wawancarai langsung kepada bidang akuntansi dalam guna untuk mendapatkan laporan realisasi anggaran.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Nabire adalah laporan realisasi anggaran dan belanja Daerah tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013 didalam laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan daerah, namun komponem dalam Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan hanyalah Daerah. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut digunakan rasio keuangan.

Tabel :1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun	2011	2012	2013
Rasio			
Pendapatan Asli Daerah	39,156,908,654	40,602, 292,882	39,156,908,645
Dana Perimbangan	1,088,311,768	1,226, 312, 097, 978	1,088,311,768
Lain-lain pendapatan yang sah	304,260,938,574	216,178,588,548	216,178,588,548
Total	40,245,220,422	216,178,588,548	256,423,808,970

Tabel diatas dilihat bahwa, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah kabupaten Nabire. Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah 39,156,908,654, Dana perimbangan 1, 088,311,768, lain-lain pendapatan yang sah 304,260,938,574. Tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah 40,602,292,882, dana perimbangan 1,226,312,097,971 pendapatan yang sah 216,178,588,548. Tahun 2013

Pendapatan Asli Daerah 36,197,229,586 Dana Perimbangan 1,257,989,102,700 lain-lain pendapatan yang sah 301,722,324,846.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2, Hasil Perhitungan menggunakan rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio keuangan	2011	2012	2013
Rasio Kemandirian	0,02%	0,012%	0,2%

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Nabire mengalami penurunan dan kenaikan Perhitungan kinerja keuangan melalui kemandirian keuangan daerah, di dapat pada tahun 2011 0,02%, pada tahun 2012 , 0,12% dan pada tahu 2013 0,2%.

2. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan perbandingan realisasi pendapatan asli daeran dengan target pendapatan asli daerah

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3, Hasil perhitungan menggunakan rasio Efektifitas keuangan daerah

Rasio keuangan	2011	2012	2013
Rasio Efektivitas	2,56%	1,82%	1,50%

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dilihat bahwa rasio efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Nabire tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 Tingkat efektifitas keuangan pemerintah daerah, masi sangat tinggi terhadap pendapatan daerah, kabupaten Nabire tahun 2011 rasio efektifitas keuangan daerah 2,56%, pada tahu 2012 menurun efektifitas keuangan daerah sebesar 1,82% dan tahun 2013 sangat rendah 1,50% rasio efektifitas keuangan daerah menurun.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah adalah perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk pemungut pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk pemungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel4.Rasio Efisiensi Keuangan daerah.

Rasio keuangan	2011	2012	2013
Rasio Efisiensi	1,593%	1,736%	2,164%

Sumber: Data diolah

Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi dalam pengeluaran biaya untuk memperoleh pendapatan yang diterima kabupaten Nabire adalah tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungut Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan realisasi yang diperoleh daerah, sehingga

realisasi yang diperoleh 100%, sedangkan kinerja pemerintah daerah dilakukan efisien apabila rasio yang mencapai kurang dari 1 satu atau dibawah 100%, Pada tahun 2011 rasio efisiensi 1,593%, pada tahun 2012 1,736% dan tahun 2013 2,164%

4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan PAD tahun sekarang dibandingkan dengan rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya maka kinerja pemerintahan daerah dinyatakan baik. Rasio pertumbuhan dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}_{X_n - X_{n-1}}}{\text{realisasi penerimaan PAD}_{X_{n-1}}}$$

Keterangan:

X_n = tahun sekarang

X_{n-1} = tahun sebelumnya

Tabel 5, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	2011	2012	2013
Realisasi Penerimaan	172%	0,3%	0,12%

Sumber: Data diolah

Pembahasan

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun anggaran 2011 rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Nabire sebesar 0,02%, pada tahun 2011 rasio kemandirian menurun dari tahun sebelumnya, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2012 0,12%, pada tahun 2013 rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah sebesar 0,02%, berarti selama tiga tahun kabupaten Nabire kemandirian daerah rendah, karena potensi yang dimiliki banyak namun belum diupayakan maka mengalami kemandirian daerah rendah.

Perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah, dari hasil perhitungan rasio efektifitas kabupaten Nabire dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah selama tiga tahun rasio efektifitas mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2011 rasio efektifitas sebesar 2,56%, tahun 2012 rasio efektifitas pemerintah kabupaten Nabire sebesar 1,18% dan pada tahun 2013 rasio efektifitas sebesar keuangan pemerintah kabupaten Nabire sebesar 1,50% rasio efektifitas selama tiga tahun menurun.

Perhitungan dari rasio efisiensi dari hasil perhitungan diatas dilihat bahwa pengeluaran biaya untuk memperoleh pendapatan yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima kabupaten Nabire adalah efisien, karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi yang diperoleh daerah (realisasi pemerintah daerah) sehingga presentasi yang diperoleh dari rasio efisien melebihi 100% sedangkan kinerja pemerintah daerah melakukan efisien apabila melebihi kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Pada tahun 2011 rasio efisien pendapatan daerah kabupaten mencapai 1.593%. pada tahun 2012 rasio sebesar 1.736%. dan pada tahun 2013 sebesar 2.164%.

Hasil ini menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten Nabire masih kurang efisien dan melakukan pemungutan pendapatan daerah disebabkan karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada realisasi pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten Nabire adalah mengefisiensikan biaya adalah baik. Perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Nabire tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 berkisar dari 172% sampai 0,12% ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2011 rasio pertumbuhan kabupaten Nabire sebesar 172%. Pada tahun 2012 rasio pertumbuhan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,3% dan pada tahun 2013 pertumbuhan PAD kabupaten Nabire sebesar 0,12%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan PAD adalah tidak baik.

PENUTUP**Kesimpulan**

1. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Nabire mengalami penurunan dan kenaikan. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten nabire 1 (satu) sampai dengan 6 % selama tahun anggaran 2011-2013. Dalam hal ini kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dikatakan cukup baik dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukan cukup baik.
2. Rasio Efektivitas, pemungkutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Nabire tahun anggaran 2011-2013 baik karena presentase yang diperoleh dari rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire melebihi satu atau 100%. Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nabire dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah adalah baik.
3. Rasio Efisiensi dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang di bandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima di kabupaten Nabire tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar di bandingkan dengan realisasi yang di peroleh daerah (Realisasi Penerimaan Daerah) sehingga presentasi yang di peroleh dari rasio efisiensi melebihi 100 % sedangkan kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah dari 100%.

Saran

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Nabire maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Nabire harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya eksternal atau bantuan pemerintah Pusat dan Provinsi dengan mengelolah sumber daya yang belum diolah selama ini.
2. Diharapkan pemerintah daerah Nabire perlu meningkatkan realisasi pemerintah pendapatan asli daerah dari tahun ketahun sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah yang lebih baik. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran pembayaran pajak dan retribusi daerah.
3. Pemerintah daerah sebaiknya meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Analisis Keuangan dan Moneter Kumpulan Peraturan otonomi Daerah.

Ihyady Ulum 2013. Analisis Rasio Keuangan pada APBD Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas sanata Dharma.

Mahsun, 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Mardiasmo, 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.

Mahmudi, 2013. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit UPP,STIM, YPKN, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah.

Werren, 2008. Pengantar Akuntansi, Salemba Embat Jakarta Selatan.

Widarta 2010. Otonomi Daerah bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam penentuan langkah-langkah sendiri Bandung.

Witmore 2010. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah daerah. Yogyakarta.

Yunus 2007. Faktor yang menghambat Pembangunan Pemerintah Daerah Dalam masa otonomi Daerah Kabupaten Nabire. *Skripsi USWIN* Fakultas Ekonomi Hal 40-46.

